

ABSTRAK

APBD 2021

NOMOR:3

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama
 - Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.5 Tahun 2009; PP No.65 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2016; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.1 Tahun 2018; PP No.33 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.16 Tahun 2007; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri 36 Tahun 2011; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.77 Tahun 2014; Permendagri No.6 Tahun 2017; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.36 Tahun 2018; Permendagri 70 Tahun 2019; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.99 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2020; Permendagri No.40 Tahun 2020; Permendagri No.64 Tahun 2020; Permenkeu No.19 Tahun 2020; Permenkeu No.35 Tahun 2020; Perda No.18 Tahun 2007.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2020 - Penjelasan : hlm.